



LAPORAN BULANAN

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur. 13950
email : ptun.jakarta@gmail.com | Telepon : (021) 22859672

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Jenis Laporan	1
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS	2
A. Kesekretariatan	2
B. Kepaniteraan	13
BAB III. TELAAHAN	21
BAB IV. KESIMPULAN, USUL DAN SARAN	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, salah satunya adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Bulanan ini merupakan kumpulan dari masing – masing Sub Bagian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga di maksud pula sebagai bahan informasi penyempurnaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

C. JENIS LAPORAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki Jenis Laporan meliputi bidang Kesekretariatan, bidang Kepaniteraan dan bidang lainnya sebagai berikut :

1. Kesekretariatan :

- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

2. Kepaniteraan :

- Kepaniteraan Perkara
- Kepaniteraan Hukum

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS

A. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan PTUN Jakarta adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM dan Saprasi di lingkungan PTUN Jakarta.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :



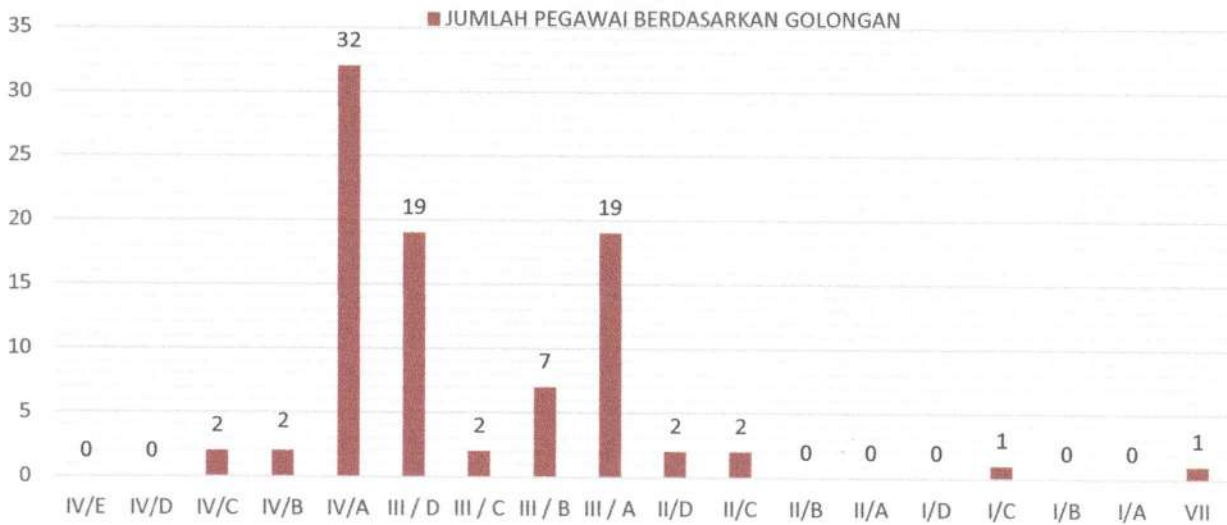
- SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

a. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 September 2024 adalah 86 Orang (Sembilan Puluh) PNS, 2 Orang CPNS, 1 Orang PPPK (P3K) dan PPNPN berjumlah 11 Orang, yang terdiri dari Laki-laki yang berjumlah 62 orang dan Perempuan 38 Orang. Adapun rinciannya sebagai berikut :

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



Mutasi

Mutasi Kedalam Wilayah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	-	-	-	-

Mutasi Keluar Wilayah

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	-	-	-	-

MUTASI Keluar Wilayah :

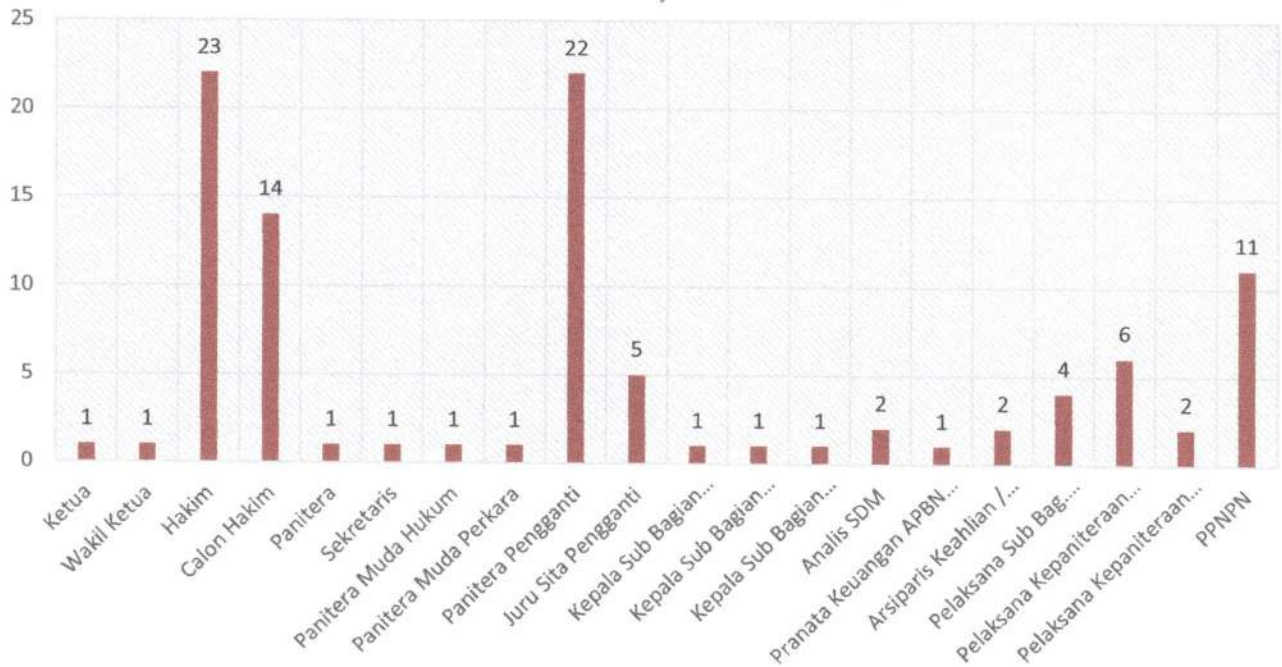
NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	-	-	-	-

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

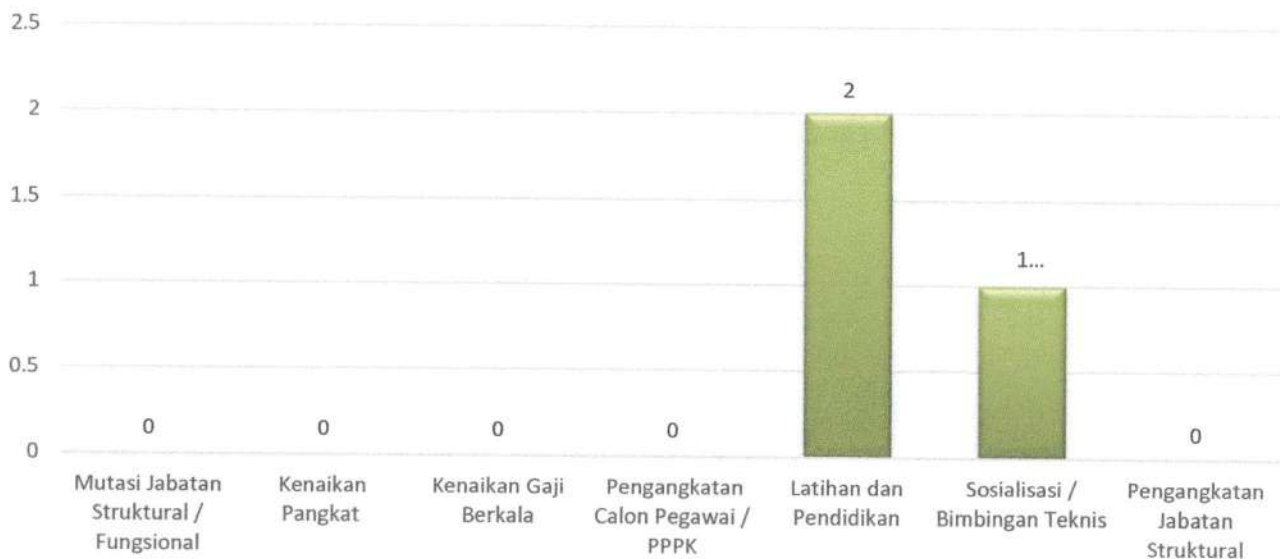
Pelantikan / Pengangkatan Jabatan Baru :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	-	-	-	-

JABATAN FUNGSIONAL / STRUKTURAL



KEPEGAWAIAN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

a. Umum

1. Tata Persuratan :

Surat Keluar

NO	SUB	SURAT			JUMLAH
		BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	Sub.Bag.Kepegawaian dan Ortala	68	0	0	68
2	Sub.Bag.Umum dan Keuangan	17	0	0	17
3	Sub.Perencanaan, TI,dan Pelaporan	9	0	0	9
4	Kepaniteraan Muda Perkara	182	0	0	182
5	Kepaniteraan Muda hukum	27	0	0	27
6	Lain-lain	0	0	0	0
TOTAL					303

Surat Masuk

NO	SUB.BAGIAN	SURAT MASUK				JUMLAH
		DARI	BIASA	PENTING	RAHASIA	
1		MAHKAMAH AGUNG RI	110	0	0	110
2		PT.TUN-JAKARTA	0	0	0	0
3		BALITBANG DIKLAT KUMDIL	2	0	0	2
4	PERSURATAN	DIRJEND.BADIMILTUN	1	0	0	1
5		KOMISI YUDISIAL	3	1	0	3
6		PERKARA/LAIN-LAIN	81	0	0	81
7		UMUM/LAIN-LAIN	14	0	0	14
TOTAL					211	

2) Tata Kearsipan :

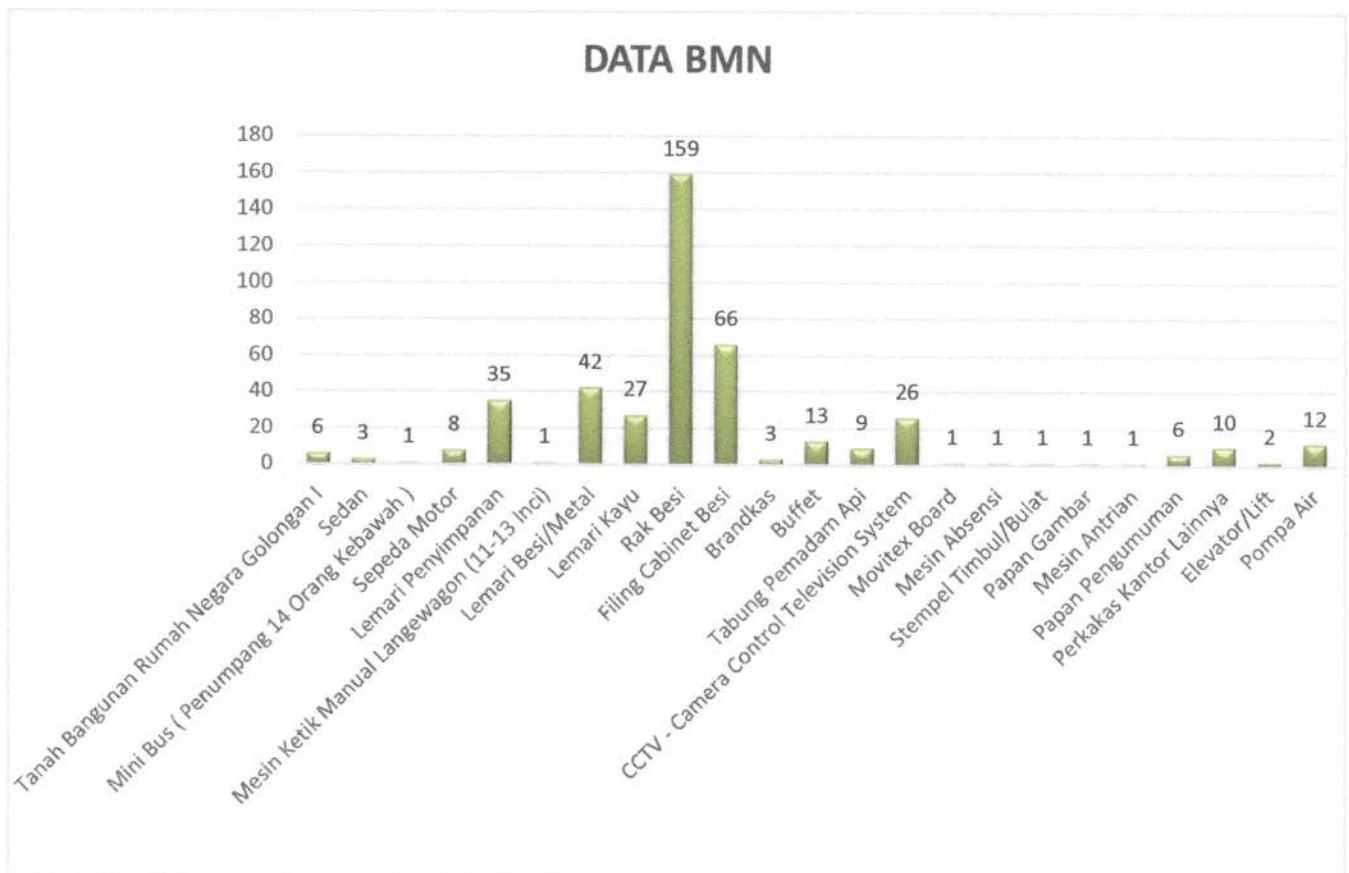
Arsip - arsip yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertata dengan tertib melalui media penyimpanan, seperti file Ordner, Rak Arsip, Lemari Besi dan Arsip Data Komputer (ADK) sehingga memudahkan dalam pencarian.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

3) Inventaris dan Persediaan :

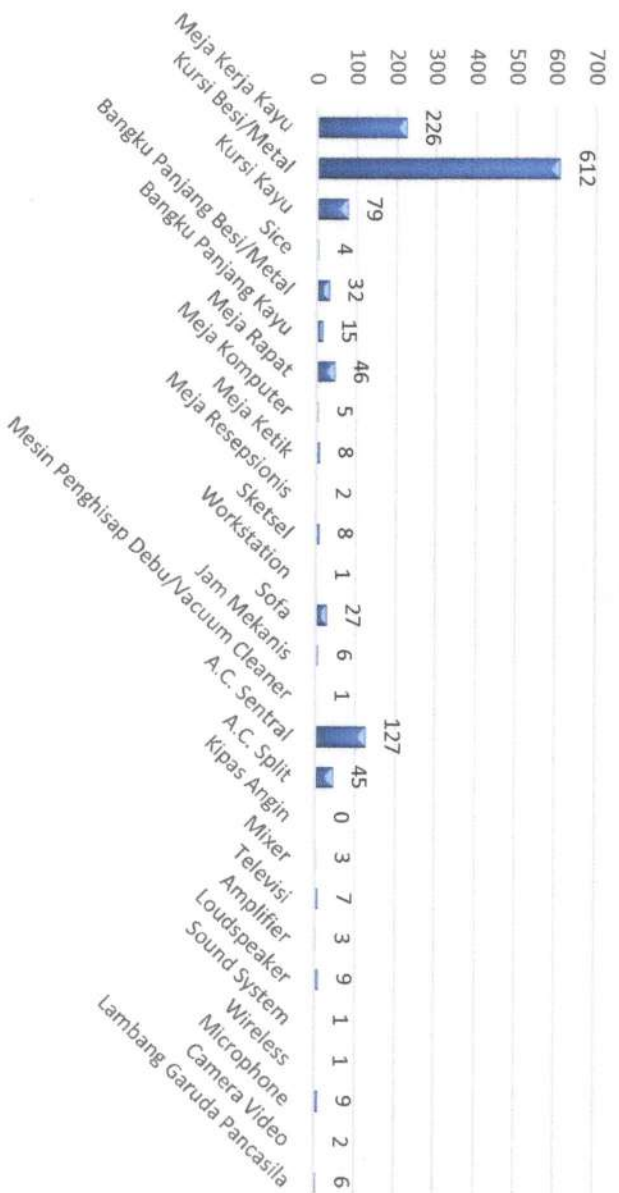
Inventaris dan persediaan kantor dikelola dan di bukukan sesuai petunjuk yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yakni menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan aplikasi Persediaan.

Untuk bulan September Tahun 2024 aset Inventaris Pengadalan Tata Usaha Negara Jakarta pengadaan barang / jasa sebagai berikut :

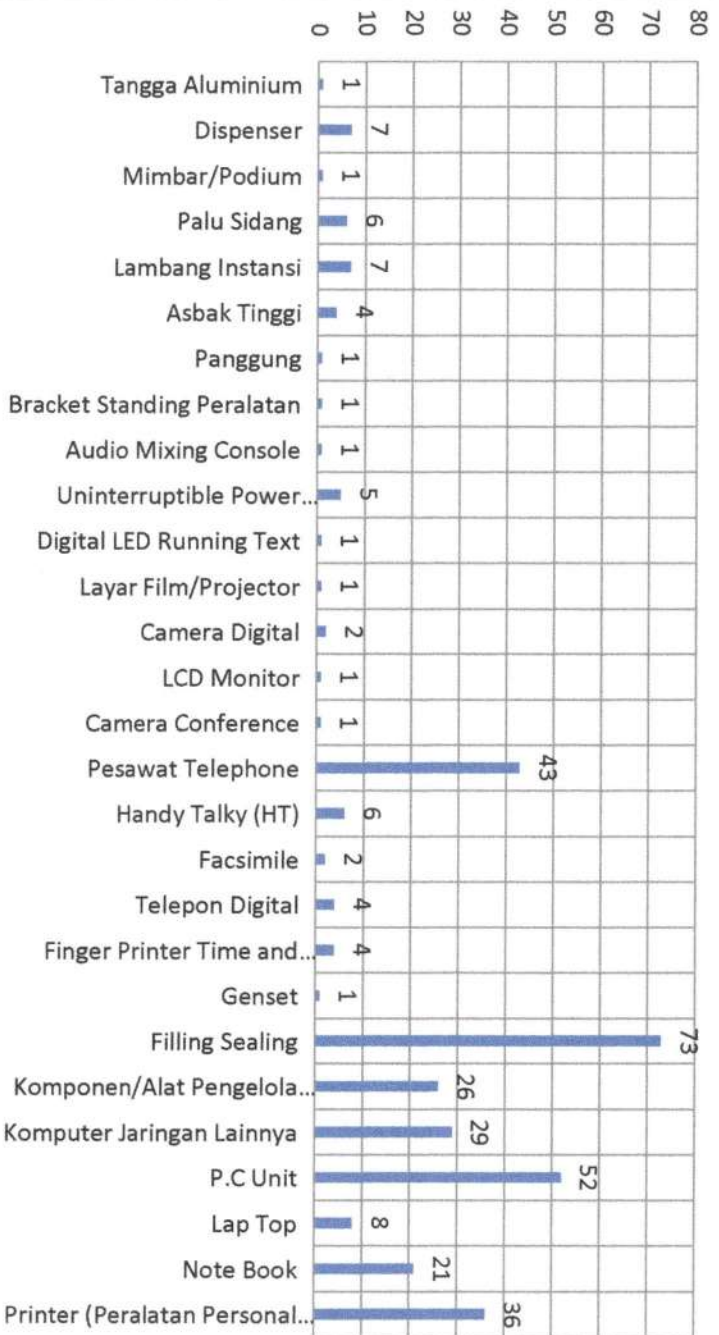


LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

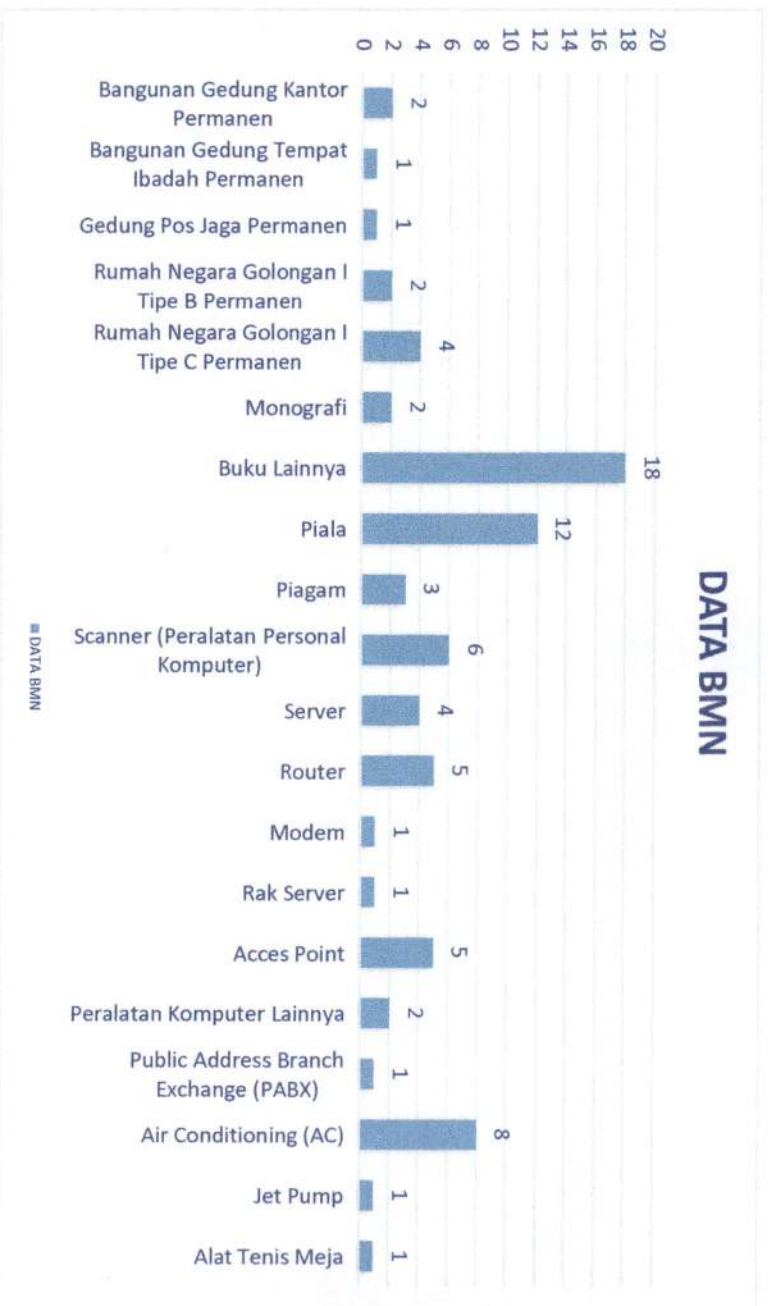
DATA BMN



DATA BMN



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



Untuk Bulan September 2024 Perpustakaan Pengadialan Tata Usaha Negara tidak ada penerimaan buku atau majalah yang masuk.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

b. Keuangan

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA BULAN : SEPTEMBER 2024

SATKER / KODE SATKER : (226732) PENGADAN TATA USHA NEGARA JAKARTA
 PRORNG : (0200) DKI JAKARTA
 BAGIAN ANGGARAN : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 No. DIPA : DIPA-005.01.2.526732/2024

No.	KODE	JENIS BELANJA / MAK	REALISASI S/D BULAN LALU			REALISASI BULAN INI		TOTAL REALISASI			SSA DANA			REK
			PAGU DIPA	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%			
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8 = (7/4)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11 = (4+9)	12 = (12/4)	13		
001	51	BELANJU PERAWAN	13.385.208.000	10.258.122.323	77%	948.630.719	7%	11.206.753.042	84%	2.178.452.958	16%			
1066	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4.951.659.000	3.926.460.820	79%	354.423.720	7%	4.270.884.540	86%	680.774.460	14%			
EBA.994	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	62.000	49.696	80%	3.950	6%	52.646	85%	8.356	13%			
001.A	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	370.819.000	291.144.216	79%	25.935.440	7%	317.079.652	86%	53.739.348	14%			
	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	120.377.000	94.090.018	78%	8.372.866	7%	102.462.884	85%	17.914.116	15%			
	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	43.200.000	31.080.000	72%	2.880.000	7%	34.560.000	80%	8.640.000	20%			
	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	5.769.150.000	4.510.085.000	78%	412.375.000	7%	4.922.460.000	85%	846.690.000	17%			
	511125	Belanja Tunj. Pns PNS	224.004.000	675.547.615	301%	45.263.189	6%	720.810.804	100%	3.198.156	0%			
	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	724.004.000	702.776.000	97%	18.322.260	7%	721.098.260	86%	36.426.740	5%			
	511129	Belanja Uang Makan PNS	1.001.611.000	441.498.000	44%	71.528.000	7%	512.996.000	51%	486.455.000	48%			
	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	84.694.000	51.730.000	61%	5.345.000	6%	57.075.000	67%	27.579.000	33%			
	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	39.600.000	31.023.600	78%	2.858.800	7%	33.882.400	86%	5.717.600	14%			
	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.000	740	11%	68	1%	858	12%	6.142	87%			
	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	3.204.000	0	0%	0	0%	0	0%	3.204.000	100%			
	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.680.000	0	0%	0	0%	0	0%	1.680.000	100%			
	511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	4.900.000	3.850.000	79%	350.000	7%	4.200.000	86%	700.000	14%			
	511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	4.054.000	296.420	7%	22.420	2%	3.860.040	21%	3.184.960	79%			
	511626	Belanja Uang Makan PPPK	8.400.000	5.390.000	64%	770.000	9%	6.160.000	73%	2.240.000	27%			
002	52	BELANJA BARANG	2.687.430.000	1.891.940.700	70%	115.293.057	4%	2.007.233.757	75%	680.196.243	25%			
	A	Kebutuhan Satuan dan Perkantoran												
1066	521111	Belanja Kebutuhan Kantor	726.284.000	502.812.000	69%	55.968.000	8%	558.680.000	77%	167.604.000	23%			
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	49.402.000	23.516.985	48%	2.400.450	5%	25.917.435	52%	23.484.617	48%			
EBA.994	521811	Belanja Perbaikan Barang Konsumsi	66.000.000	1.817.397	3%	33.087.990	50%	34.905.387	53%	31.099.613	47%			
002.A	B	Pengadaan Daya dan Jasa												
	521111	Belanja Kebutuhan Kantor	230.090.000	215.038.141	93%	1.066.619	0%	216.154.760	94%	4.602.234	2%			
	521114	Belanja Pengiriman Surat, Email, Pos, Paket	4.800.000	1.073.000	22%	275.000	6%	1.348.000	28%	3.472.000	72%			
EBA.994	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	74.162.000	50.512.000	68%	4.630.000	6%	55.142.000	74%	19.020.000	26%			
	521212	Belanja Langganan Telepon	6.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	6.000.000	100%			
	521213	Belanja Langganan Air	3.000.000	0	0%	0	0%	0	0%	3.000.000	100%			
	C	Perbaikan dan Kantor												
	521111	Belanja Perbaikan Gedung dan Rongkangan	189.852.000	180.777.500	100%	0	0%	189.777.500	100%	74.500	0%			
	521119	Belanja Perbaikan Gedung dan Rongkangan Lainnya	42.000.000	44.433.420	106%	0	0%	44.433.420	106%	666.000	1%			
	521211	Belanja Perbaikan Peralatan dan Mesin Operasional Lainnya	389.180.000	215.484.517	55%	11.036.298	3%	226.520.815	58%	61.159.185	16%			
	D	Operasional Lainnya												
	521111	Belanja Kebutuhan Kantor	48.750.000	26.850.000	55%	0	0%	26.850.000	55%	21.900.000	45%			
	524111	Belanja Perjalanan Bisnis	58.200.000	4.380.000	7%	4.726.700	8%	9.106.700	15%	50.093.300	86%			
	524113	Belanja Perjalanan Dalam Kota	150.000	0	0%	0	0%	0	0%	150.000	100%			
	522141	Belanja Sewa	303.950.000	618.990.000	204%	0	0%	618.990.000	204%	287.120.000	47%			
			16.077.636.800	11.150.063.023	70%	1.063.973.776	7%	13.213.986.799	82%	2.858.649.201	18%			

04/10/2024
 WA SALAHUBUNGAN SE
 NP 1977041120060410001

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 05

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA BULAN : SEPTEMBER 2024

SATKER / KODE SATKER : (526733) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 PROPINSI : (0100) DKI JAKARTA
 BAGIAN ANGGARAN : (05) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
 No. DIPA : DIPA-005.05.2.526733/2024

No.	KODE	JENIS BELANJA / MAK	REALISASI S/D BULAN LALU			REALISASI BULAN INI		TOTAL REALISASI		SISA DANA		KET
			PAGU DIPA	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6 = (5/4)	7	8 = (7/4)	9 = (5+7)	10 = (9/4)	11 = (4-9)	12 = (11/4)	13
	52	BELANJA BARANG	71.020.000	28.306.000	40%	7.011.000	10%	35.317.000	50%	35.703.000	50%	
AEA.003.051A.5.	521211	Belanja Bahan (Konsumsi Pengamanan Sidang)	34.040.000	6.560.000	19%	6.640.000	20%	13.200.000	39%	20.840.000	61%	
QCA.001.051A.5.	521211	Belanja Bahan (ATK dan Penghidai berkas perkara)	3.980.000	1.950.000	49%	0	0%	1.950.000	49%	2.030.000	51%	
QCA.001.051A.5.	521211	Belanja Bahan (ATK Posbakum)	4.200.000	2.996.000	71%	371.000	9%	3.367.000	80%	833.000	20%	
QBA.001.051A.5.	522131	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (Belanja Jasa Konsumsi)	28.800.000	16.800.000	58%	0	0%	16.800.000	58%	12.000.000	42%	
			71.020.000	28.306.000	40%	7.011.000	10%	35.317.000	50%	35.703.000	50%	

Jakarta, 7 Oktober 2024
 Pih. SEKRETARIS

 ISA SALAHUDDIN, SE.
 NIP 18720411 200604 1 0041

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

a. Teknologi Informasi, pengelolaan website dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yaitu dengan melakukan pembaruan konten berita website yaitu dengan adanya Rapat Bulanan untuk Bulan September 2024 agenda rapat meliputi :

- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan dan mengingatkan kepada Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan seluruh Pegawai agar dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara Professional dengan tetap berpegang teguh dan berpedoman pada KEPPH, Kode Etik Kepaniteraan, Kode Etik ASN dan Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016 dan Maklumat No. 1 Tahun 2017 supaya kita dapat terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan terkait Disiplin Pegawai agar berpedoman pada PP 94/2021, PP 11/2017, PERKA BKN 21/2010, 071/KMA/SK/V/2008;
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan Selamat kepada Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah meraih 2 penghargaan juara 1 pada Kategori Inovasi Pelayanan Publik dan pada Kategori Video Alur Penanganan Perkara di Pengadilan;
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menginstruksikan kepada Satgas SIPP untuk mengingatkan kedisiplinan dalam pengisian data pada aplikasi SIPP ;
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga menginstruksikan untuk pengusulan Panitera Pengganti;
- Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk mempersiapkan ke datangan TIM Penilaian dari BAWAS.
- Pemberian Sertifikat penghargaan kepada Panitera Pengganti yang telah melaksanakan tupoksi mulai dari Pemeriksaan Persiapan dan persidangan sampai dengan putusan akhir dan minutasi di Bulan Juni - Juli 2024. Minutasi dilakukan pada hari yang sama dengan pembacaan putusan (one day minutasi) : Anita Syahrini, SH., M.H., Yulianti, SH., MH dan Tifin Rustinih, SH., M.H.

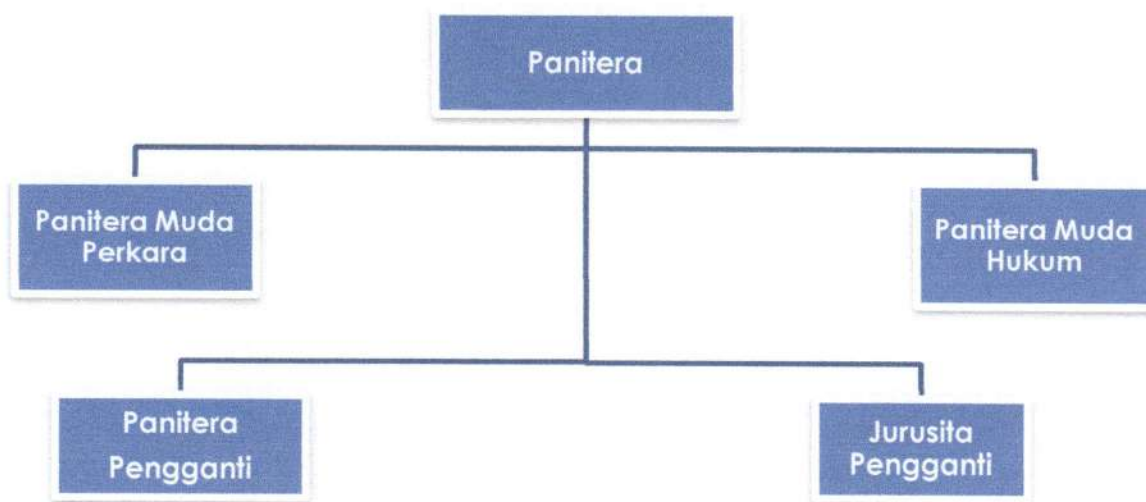
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- b. Pelaporan, jenis laporan yang di kerjakan pada sub bagian ini merupakan laporan yg bersifat umum pada Satuan Kerja dan laporan yang bersifat khusus terkait Kesekretariatan.

B. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Struktur Organisasi Kepaniteraan



1. Kepaniteraan Muda Perkara

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara :

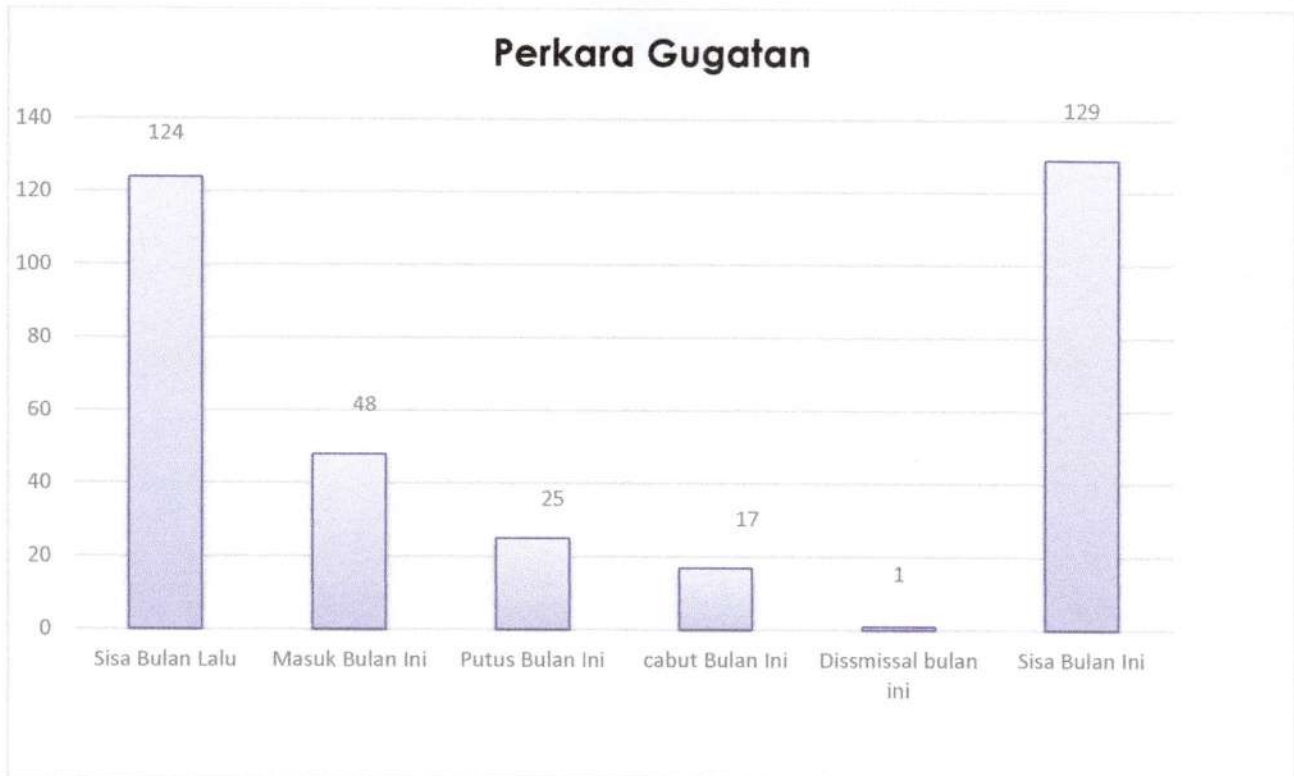
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi.
- Meneliti berkas perkara masuk.
- Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register.
- Memberi nomor register pada surat gugatan.
- Mencatat gugatan yang diterima lewat pos.
- Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang
- Membuat SKUM setelah bayar lunas panjer perkara di bank.

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Membuat jurnal keuangan perkara.
- Membuat Laporan bulanan keuangan perkara.
- Membuat laporan bulanan keadaan perkara.
- Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara Banding, kasasi dan PK kepada para pihak.
- Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim (Inzage)
- Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B).
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan.
- Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.
- Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.
- Menyerahkan arsip berkas perkara incraht kepada panmud Hukum.
- Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara.
- Mengusulkan mutasi dalam rangka penyesuaian dan karier pegawai staf pandmud perkara.
- Mengevaluasi hasil pekerjaan tahun 2023.
- Membuat SKP. 2 pegawai staf pandmud perkara
- Menyusun rencana kerja panmud perkara tahun 2024

LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Keadaan Perkara

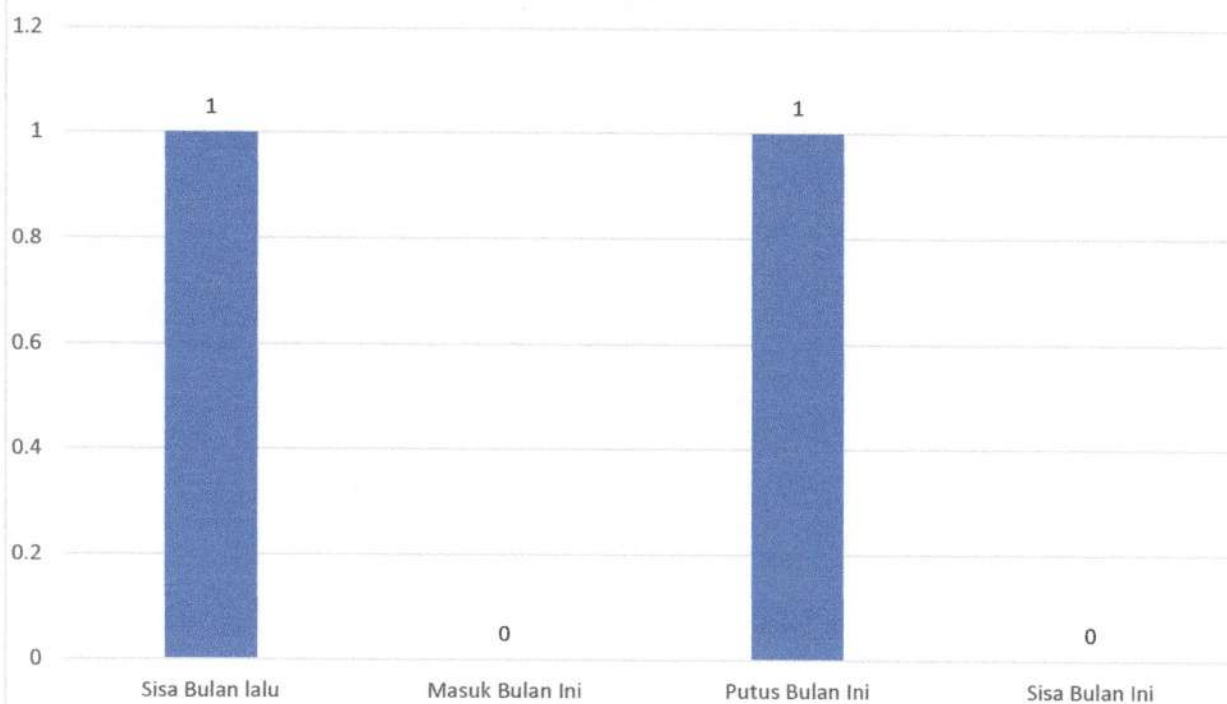


Catatan : Total Putus bulan ini adalah (di cabut + dismissal + Putus bulan ini)

$$17 + 1 + 25 = 43 \text{ Perkara (1 putusan PLW)}$$

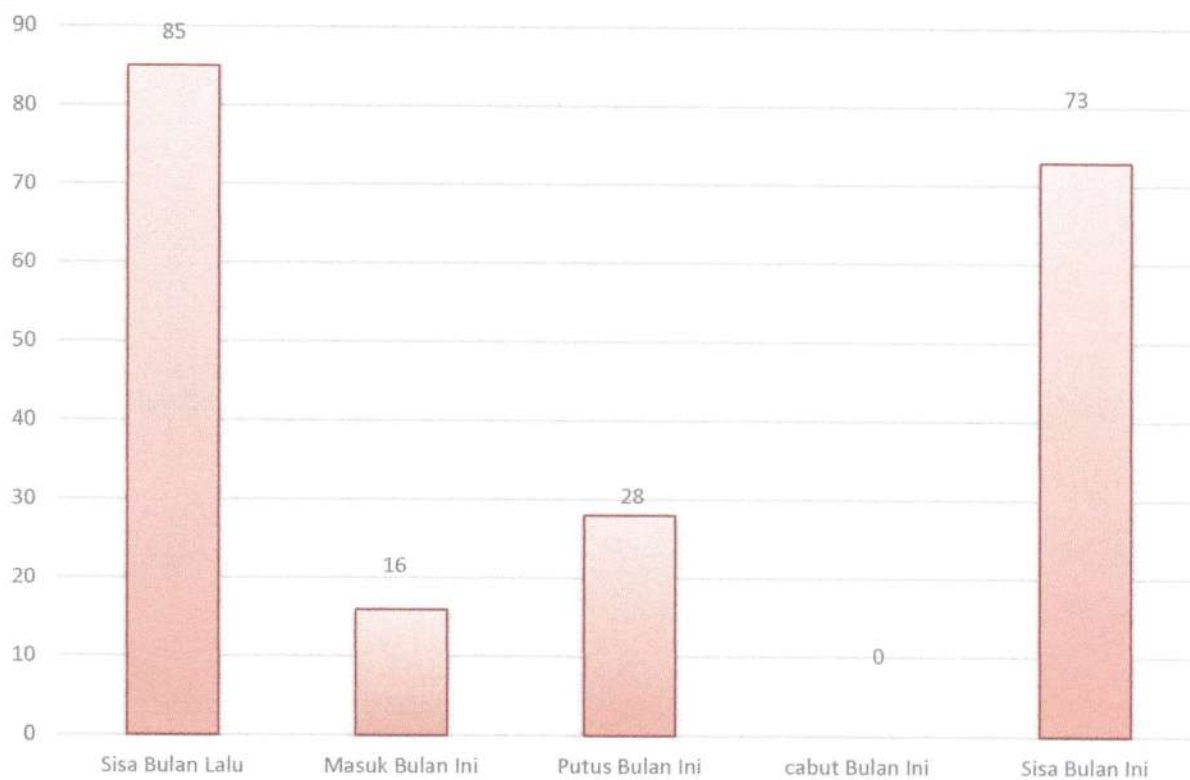
LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Perlawanan

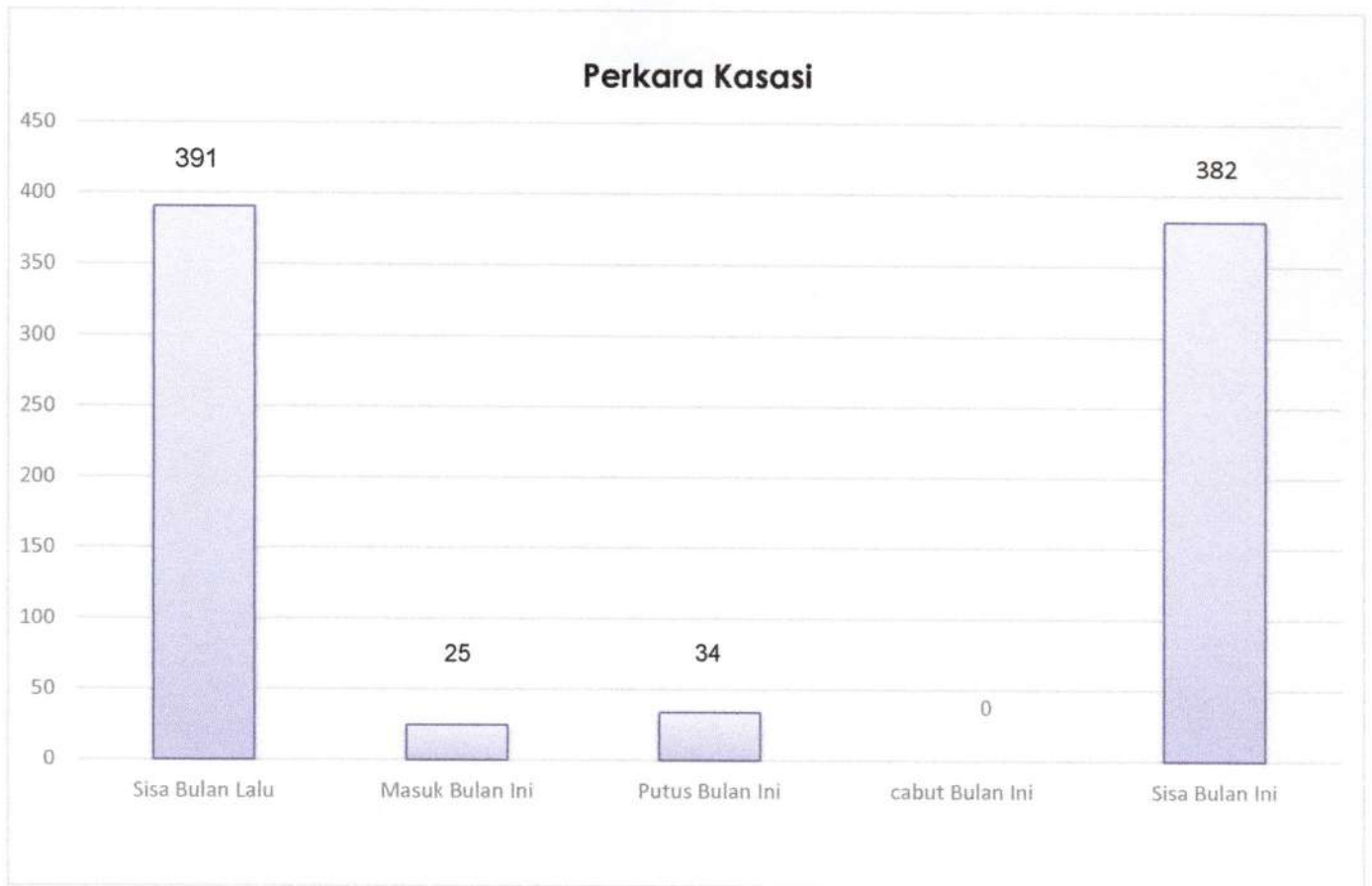


LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Perkara Banding



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

2. Kepaniteraan Muda Hukum

- Laporan Jenis Perkara Bulan Agustus 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN JENIS PERKARA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024

FORMULIR LI-T2

NO	Jenis Perkara	Ses. Bulan Lalu	Perkara		Jumlah	Pengugat	Beban	Tergugat	Dinasial	Perlawanan	Denda/ Tindak	Denda/ Tindak	Putusan					Ses. Perkara	Permohonan			Terima Berkas		Keterangan				
			Masuk	Dituntut									Pengadilan	Hukum	Paid	Daerah	Dinasial		Denda/ Tindak	Denda/ Tindak	Daerah	Daerah	Daerah		Daerah	Daerah	Daerah	Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
A GUGATAN																												
1	Perlawanan	13	6	2	17	4	2	-	6	-	-	-	2	2	-	-	4	13	1	2	-	-	2	3	1		(1 PUTUS PLW)	
2	Kepegawisan	8	2	-	10	2	-	1	1	-	1	-	1	1	1	4	6	2	-	-	-	-	2	1	-			
3	Penjinan	24	8	1	31	-	-	8	8	-	-	-	2	1	1	4	8	23	1	4	1	-	6	2	4			
4	Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	Badan Hukum/ Paspol	7	8	1	14	4	4	8	-	-	-	-	1	-	-	-	1	13	-	1	1	-	2	-	-			
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	Pengadilan Antar Waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	6	1	-	7	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-		
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Fakir Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	26	10	-	36	2	8	10	-	-	-	-	2	1	3	1	7	29	5	12	2	-	7	25	-			
17	Merek	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Lain Lain	39	13	4	48	11	2	11	2	1	-	-	2	3	3	1	10	38	7	3	-	-	9	3	-			
JUMLAH		124	48	8	164	24	24	39	9	1	1	-	9	9	8	7	35	129	16	25	4	-	28	34	5			

MENGETAHUI



Jakarta, 30 SEPTEMBER 2024



- Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Agustus 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang
Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN BULANAN PENANGANAN PENGADUAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024

L1-T5

NO	NAMA PENGADU	HAL YANG DIADUKAN	TANGGAL PENGADUAN	TINDAK LANJUT PENGADUAN	KETERANGAN
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jakarta 30 SEPTEMBER 2024



C. KEGIATAN LAIN – LAIN

- Dalam rangka meningkatkan kompetensi penggunaan Teknologi Informasi untuk penyelesaian penanganan perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyelenggarakan kegiatan Diklat di Tempat kerja (DDTK) Administrasi Perkara dan Persidangan Dalam Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan E-Court. Kegiatan DDTK dibuka oleh Wakil Ketua PTUN Jakarta Joko Setiono, S.H.,M.H..Kegiatan ini dimaksudkan agar semua pelaksana penyelesaian perkara ini mampu menjalankan aplikasi e-court dengan baik. DDTK yang berlangsung tepat pukul 09.00 Wib ini dipandu oleh **Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom** narasumber dari TIM Pengembang Mahkamah Agung. Acara ini di ikuti oleh Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Para Panmud, PP, JSP, Cakim dan Staff Kepaniteraan.
- Dalam rangka Kegiatan Lomba Peningkatan Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2024. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara memberikan Penghargaan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendapatkan **Penghargaan Juara Pertama pada Kategori Inovasi Pelayanan Publik dan Kategori Video Alur Penanganan Perkara di Pengadilan**. Pengumuman pemenang lomba dilaksanakan di Yogyakarta, tanggal 14 September 2024, Penghargaan kepada para pemenang diberikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung pada acara Malam Pemberian Penghargaan Peningkatan Pelayanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB III

TELAAHAN

Kondisi Rumah Dinas

Bahwa Rumah Negara/Dinas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang saat ini berjumlah 6 unit, dengan kondisi 2 unit dalam keadaan rusak ringan dan 4 unit kondisinya dalam keadaan tidak layak huni/memprihatinkan seperti banyaknya atap rumah yang bocor, kusen yang lapuk, lantai keramik yang retak, tembok yang rusak. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerlukan anggaran untuk renovasi rumah dinas.

Kondisi Kendaraan Dinas

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 12 Kendaraan Dinas

1. Kendaraan Roda 4 berjumlah 4 Unit, dalam kondisi rusak ringan oleh karena itu PTUN Jakarta membutuhkan tambahan anggaran.
2. Kendaraan Roda 2 berjumlah 7 Unit, dalam kondisi rusak berat sebanyak 2 (dua) unit dan 5 (lima) unit dalam keadaan rusak ringan. Oleh karena itu PTUN Jakarta memerlukan tambahan anggaran perawatan dan terhadap 2 unit kendaraan rusak tersebut kami akan mengusulkan penghapusan dari barang milik negara sehingga PTUN Jakarta masih membutuhkan 2 unit kendaraan roda 2 (dua).
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta saat ini mempunyai pegawai secara keseluruhan berjumlah 86 ASN, 2 Orang CPNS, 11 PPNPN, dan 1 orang PPPK sebagian pegawai tersebut terdapat adanya jabatan rangkap, khususnya ada 3 (tiga) Panitera Pengganti dan 5 (lima) JSP yang merangkap sebagai staf pada Kepaniteraan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih memerlukan penambahan pegawai yang diperuntukan sebagai staf di Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

BAB IV

KESIMPULAN, USUL DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Pelaksanaan jalannya organisasi dan tata kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Bulan September 2024 berjalan dengan baik dan lancar.

2. USUL DAN SARAN

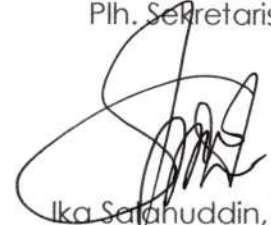
Dalam rangka pelaksanaan tugas di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kami mengusulkan peningkatan Sumber Daya Manusia :

- Mohon agar diberikan Anggaran untuk renovasi rumah dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- Mohon Penambahan Pegawai untuk ditempatkan di bidang Kesekretariatan dan di Kepaniteraan yang saat ini banyak di isi dari Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti).
- Mohon agar diberikan Anggaran Belanja Modal untuk keperluan Pengadaan Scanner untuk Panitera Pengganti dan Kepaniteraan.


Jakarta, 08 Oktober 2024

Mengetahui
Wakil Ketua,

Jako Setiono, SH., MH.
NIP. 196812151996031003







Plh. Sekretaris,

Ika Sarahuddin, S.E.
NIP. 197204112006041001

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta







No	Rumah Dinas 1 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
1		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Ketua PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi rusak berat yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, serta langit-langit akan runtuh. • Membahayakan / beresiko difungsikan, • Perbaikan dengan rekonstruksi.




Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 2 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
2		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi Rusak Ringan yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Atap atap /plafon jebol, • Kusen yang sudah termakan rayap, • Dinding / tembok yang sudah mulai kusam dan rusak • Kaca depan rumah pecah • Pagar roboh
		
		
		
		
		

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 3 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
3		<ul style="list-style-type: none"> - Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta, - Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur, - Kondisi rusak berat yang terdiri dari ; <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, • Kompenen penunjang lainnya rusak total • Membahayakan / beresiko difungsikan, • Perbaikan dengan rekontrusi.
		
		
		
		
		

Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 4 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
4		<ul style="list-style-type: none">- Rumah dinas Wakil Ketua PTUN Jakarta,- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none">• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak,• Komponen penunjang lainnya rusak seperti atap dan pagar• Membahayakan / beresiko difungsikan,• Perbaikan dengan rekonstruksi.

KENDARAAN DINAS RODA 2

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
1	Honda Tiger CW 200 cc	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Tiger CW 200 cc - Plat Nomor B 6017 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Berat 	2	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6016 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
3	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6018 TQA - Merk Honda - Thn 2007 - Kondisi Rusak Ringan 	4	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6391 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan
					

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
5	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6392 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	6	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6393 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Berat
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
7	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6394 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan 	8	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> - Honda Supra X 125 D - Plat Nomor B 6395 TQA - Merk Honda - Thn 2008 - Kondisi Rusak Ringan
					